

PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH: STUDI STRATEGI PERENCANAAN BAPPEDA JOMBANG

Yunita Royana¹, Junaedi², Humaidah Muafiqi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum, Jombang, Indonesia

Koresponden: itha.royana@gmail.com

Diterima:
1 Maret 2025

Revisi:
20 Maret

Disetujui:
29 Maret 2025

Publikasi:
2 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Jombang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian perencanaan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi arsip perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Kabupaten Jombang dilakukan secara terstruktur, melibatkan berbagai aktor, dan berfokus pada potensi lokal. Namun, terdapat tantangan dalam optimalisasi verifikasi data dan kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi yang berbasis wilayah dengan pendekatan tematik dan spasial menjadi strategi utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan, ekonomi daerah, strategi pembangunan, kebijakan.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan berkesinambungan, yang mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan secara simultan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memerlukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing, serta menghindari kesenjangan antarwilayah (Todaro dan Smith, 2015).

Kesenjangan pembangunan antardaerah sering kali menjadi pemicu ketimpangan sosial, migrasi tenaga kerja yang tidak seimbang, dan konflik sumber daya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi acuan dalam pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjadi landasan dalam menarik investasi dari berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta (Kuncoro, 2013).

Kelembagaan menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Institusi yang kuat dan bersih dari praktik-praktik korupsi dapat memperlancar pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah justru dapat

menghambat proses pembangunan, bahkan menimbulkan kegagalan program. Kegagalan ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga investor dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan (North, 1990). Oleh karena itu, sistem kelembagaan perlu diperbaiki dan diperkuat untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penting untuk membedakan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mencakup perubahan struktural yang mendalam dalam masyarakat dan lembaga, sementara pertumbuhan ekonomi lebih berfokus pada peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) atau pendapatan per kapita. Meskipun keduanya memiliki korelasi, pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Todaro dan Smith, 2015).

Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pembangunan daerah telah diarahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021, yang menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi guna mendorong pemulihan pasca pandemi Covid-19 (Munjidah, 2021). Pandemi telah memberikan dampak besar terhadap pencapaian target pembangunan, baik secara makroekonomi maupun indikator sosial.

Berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang tahun 2021, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang tinggi, seperti Indeks Good Governance (121,18% dari target), Indeks Pembangunan Manusia (100,49%), dan Indeks Kesalehan Sosial (100,01%). Namun demikian, masih terdapat tiga indikator penting yang belum mencapai target 100%, yakni Pertumbuhan Ekonomi (81,41%), Indeks Gini (99,40%), dan Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman (95,42%) (Bappeda Jombang, 2021).

Ketidaktercapaian indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya tantangan struktural dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal bisa disebabkan oleh lemahnya investasi sektor produktif, kurangnya inovasi ekonomi lokal, serta belum optimalnya dukungan dari kelembagaan terkait. Sementara itu, indeks Gini yang masih tinggi menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlambat proses pembangunan inklusif (World Bank, 2020).

Pentingnya keterlibatan multi-pihak dalam perencanaan pembangunan juga perlu ditekankan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal sangat dibutuhkan, terutama dalam hal investasi dan pemanfaatan sumber daya lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Stiglitz, 2000). Perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan didukung oleh data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Jombang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidaktercapaian perencanaan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan, serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan studi ekonomi pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan filosofi non-positivistik, yang menempatkan realitas sebagai bagian dari subjek penelitian (Biyanto, 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk menggali mekanisme perencanaan bidang ekonomi oleh BAPPEDA Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian dilakukan di BAPPEDA Jombang pada Februari–Juni 2022. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan Kepala BAPPEDA, Sekretaris, dan Bidang Ekonomi, serta dokumentasi berupa arsip perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKPD.

Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara langsung) dan data sekunder (dokumen kebijakan). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan deduktif, induktif, dan deskriptif-analitik. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan kehadiran di lapangan, observasi mendalam, triangulasi sumber dan metode, serta diskusi sejawat (Julianda, 2013). Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif proses perencanaan ekonomi dalam pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Kabupaten Jombang merupakan kegiatan yang terstruktur, menyeluruh, dan melibatkan banyak aktor, baik dari pemerintah, perangkat daerah teknis, hingga masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan (Musrenbang). Wilayah Kabupaten Jombang yang secara geografis berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur dengan aksesibilitas yang tinggi memberikan keuntungan strategis dalam hal pembangunan ekonomi dan pemanfaatan potensi wilayah.

Secara administratif, Jombang terdiri dari 21 kecamatan yang dibagi menjadi tiga kawasan utama: kawasan utara, kawasan tengah, dan kawasan selatan. Kawasan utara memiliki fisiografi perbukitan dan kapur muda, kawasan tengah didominasi oleh lahan pertanian dengan sistem irigasi yang baik, sedangkan kawasan selatan merupakan wilayah pegunungan yang cocok untuk komoditas perkebunan. Diferensiasi spasial ini menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, termasuk di sektor ekonomi.

Kabupaten Jombang telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2018–2023 yang merupakan bagian dari tahap keempat RPJPD 2005–2025. Visi besar pembangunan ini adalah "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing". Visi ini diterjemahkan ke dalam tiga misi utama: peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan masyarakat berkualitas dan religius, serta peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Bidang ekonomi dalam Bappeda memiliki tanggung jawab untuk menjabarkan misi ketiga tersebut ke dalam program-program prioritas dan kegiatan konkret.

Bidang ekonomi Bappeda Jombang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan regulasi nasional, seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Fungsi substansi yang dijalankan bidang ini antara lain menyusun kebijakan teknis, koordinasi antarperangkat daerah, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan indikator kinerja. Dalam praktiknya, penyusunan RPJMD melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat, melalui proses konsultasi publik dan Musrenbang.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2018–2023, adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kondisi sosial-ekonomi menjadi sangat penting. Salah satu tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran dan mengubah prioritas pembangunan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Mundjidah Wahab, pemerintah daerah diarahkan untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan sektor kesehatan (JejakKasus, 2022). Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Jombang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,98%, dan baru mengalami pemulihan menjadi 3,24% pada tahun 2021, meskipun masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi (BPS Jombang, 2022).

Perubahan indikator kinerja utama (IKU) dan penyesuaian nomenklatur program pembangunan juga menjadi konsekuensi dari penerapan regulasi baru, seperti penerapan SNA 2008 pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penggunaan Geometric Mean dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi digantikan dengan Indeks Good Governance, serta penambahan indikator baru seperti Indeks Risiko Bencana dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Bappeda juga bertugas menyusun dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang merupakan turunan tahunan dari RPJMD. Dalam penyusunan RKPD 2023, misalnya, dilakukan serangkaian tahapan mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga kabupaten, forum perangkat daerah, penyusunan rancangan, fasilitasi oleh provinsi, hingga penetapan RKPD. Proses ini diikuti oleh bidang ekonomi yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan masukan sektor ekonomi dan memastikan sinergi antara usulan masyarakat, janji politik bupati, dan visi pembangunan jangka menengah.

Selain itu, penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan program pembangunan. Renstra disusun secara simultan dengan RPJMD, dan Renja merupakan dokumen kerja tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam proses ini, bidang ekonomi Bappeda bertugas memverifikasi rencana perangkat daerah agar selaras dengan sasaran strategis daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas ini. Salah satunya adalah belum optimalnya proses verifikasi karena dilakukan sebelum penginputan data ke dalam SIPD, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di bidang ekonomi. Transformasi jabatan struktural menjadi fungsional yang belum diiringi pelatihan teknis juga turut memengaruhi efektivitas kerja. Koordinasi antarperangkat daerah, walaupun sudah cukup baik, masih memerlukan peningkatan untuk menghindari tumpang tindih program dan inefisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program-program inovatif seperti "Jombang Berkadang" yang mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta per desa serta alokasi indikatif kewilayahan sebesar Rp15,75 miliar per kecamatan menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan partisipatif. Program ini mencerminkan prinsip pembangunan dari bawah (bottom-up) yang memungkinkan desa menyusun dan menjalankan program prioritas berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, prinsip perencanaan partisipatif sebagaimana dikemukakan Friedmann (1987), yaitu sinergi antara teknokratisme dan masyarakat sipil, sangat relevan. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga merupakan upaya demokratisasi pembangunan yang penting untuk mewujudkan keadilan sosial.

Bappeda Jombang juga menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendekatan ini sesuai dengan

gagasan pembangunan berbasis wilayah (*place-based development*) yang dikemukakan oleh Barca et al. (2012), yang menekankan pentingnya strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan wilayah. Dalam hal ini, keberadaan kawasan strategis seperti Kawasan Agropolitan, Kawasan Cepat Tumbuh Tembelang, Perak, dan Ploso menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Perencanaan berbasis spasial ini memudahkan identifikasi potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Selain itu, bidang ekonomi juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan, seperti pengembangan pasar sehat, kawasan agropolitan, dan sinergi CSR perusahaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan. Seperti dijelaskan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda, keberhasilan proses perencanaan sangat bergantung pada peran aktif perangkat daerah teknis. Ketika perangkat daerah terlibat secara aktif, maka kualitas produk perencanaan meningkat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, faktor pendukung keberhasilan antara lain adalah kebijakan RTRW Kabupaten Jombang yang menetapkan kawasan pertanian dan kawasan prioritas ekonomi, alokasi dana desa, serta sinergi program pusat dan daerah. Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas implementasi dan memperluas jangkauan manfaat pembangunan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan akademisi dan LSM untuk mendukung kajian ilmiah dalam menyusun program yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Sebaliknya, faktor penghambat yang mengganggu ketercapaian indikator pembangunan ekonomi antara lain adalah dampak pandemi COVID-19, kebijakan PPKM, serta refocusing anggaran yang menyebabkan pemangkasan pada beberapa program strategis. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi juga menurun akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemulihan ekonomi melalui program vaksinasi, penguatan sektor informal, dan digitalisasi layanan menjadi prioritas penting. Ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan, karena fleksibilitas daerah dalam melakukan inovasi anggaran masih terbatas.

Upaya pemulihan ekonomi lokal juga dilakukan melalui fasilitasi kegiatan pelatihan, bantuan sarana usaha, pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi tersier, serta pemberdayaan ekonomi desa. Program pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan pengembangan produk unggulan daerah menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga mendorong pembentukan koperasi digital dan ekosistem e-commerce untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.

Secara keseluruhan, mekanisme perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Jombang dapat dikategorikan sebagai mekanisme yang progresif dan adaptif. Meski menghadapi tantangan internal dan eksternal, Bappeda terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan melalui melibatkan aktor multi-sektor, pembaruan data dan indikator, serta penyempurnaan prosedur kerja. Untuk memperkuat efektivitas perencanaan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi perencanaan, serta dukungan anggaran yang memadai. Inovasi teknologi dalam perencanaan seperti pemanfaatan GIS dan dashboard digital menjadi peluang

yang perlu terus dikembangkan.

Dari sisi konseptual, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang dinamis dan multidimensional. Tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknokratik, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai demokratis, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, visi "Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing" bukan hanya menjadi slogan politik, tetapi dapat diwujudkan melalui perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Penekanan pada kolaborasi, partisipasi, dan inovasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait mekanisme perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa perencanaan telah dilakukan secara terukur melalui penyusunan dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala yang signifikan, antara lain perubahan regulasi serta dampak pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi stabilitas dan efektivitas perencanaan, khususnya pada tahun 2022. Kendati demikian, pencapaian perencanaan di bidang ekonomi juga didukung oleh kebijakan pengembangan kawasan prioritas serta alokasi anggaran yang memadai, baik di tingkat perangkat daerah maupun desa. Sementara itu, tidak tercapainya indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 disebabkan oleh kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM), penurunan aktivitas industri, serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan ekonomi di masa mendatang memerlukan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, keterlibatan pelaku usaha, serta penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD. Sinergi antara kebijakan, program, dan kinerja juga menjadi aspek penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Bappeda Kabupaten Jombang. (2021). *Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2021*. Jombang: Bappeda.
- Barca, F., McCann, P., dan Rodriguez-Pose, A. (2012). *The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches*. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152.
- Biyanto. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif dalam Studi Keislaman*. Yogyakarta: LKiS.
- BPS Kabupaten Jombang. (2022). *Kabupaten Jombang dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- JejakKasus. (2022). *Bupati Jombang Paparkan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023*. Diakses dari <https://jejakkasus.info/bupati-jombang>.
- Julianda, H. (2013). *Teknik Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Ilmiah STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Kuncoro, M. (2013). *Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: UPP STIM

YKPN.

- Munjidah, M. (2021). *Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang 2021*. Jombang: Pemerintah Daerah.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector (3rd ed.)*. New York: W.W. Norton dan Company.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Boston: Pearson Education.
- World Bank. (2020). *World Development Report: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington DC: World Bank Group.